



9 772088 235001

## MENDORONG SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PAPUA

Ully Ngesti Pratiwi\*

### Abstrak

Berbagai langkah strategis dilakukan untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di wilayah Papua sebagai salah satu program prioritas nasional. Namun, masih terdapat beragam tantangan yang menghambat, terutama dalam hal penguatan sinergitas kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah. Tulisan ini membahas terkait sinergitas kelembagaan, yaitu BP3OKP sebagai pengarah kebijakan, KEP-Otsus Papua sebagai eksekutorial, K/L terkait, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam upaya mendorong akselerasi pembangunan di wilayah Papua. Diperlukan upaya penguatan sinergitas antarlembaga melalui koordinasi dan sinkronisasi regulasi, integrasi pelaksanaan program prioritas yang mengacu pada RAPPP, pemanfaatan SIPPP, serta memperluas keterlibatan masyarakat lokal. Komisi II DPR RI melalui fungsi legislasi dapat mendorong percepatan penyelesaian RAPPP 2025–2029. Melalui fungsi pengawasan dapat memastikan penyaluran Dana Otsus berjalan tepat waktu. Melalui fungsi anggaran, dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dana Otsus, sekaligus menyesuaikan kebutuhan alokasi dana Otsus di enam provinsi agar selaras dengan agenda utama akselerasi pembangunan di wilayah Papua.

### Pendahuluan

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mendorong akselerasi pembangunan di wilayah Papua sebagai bagian dari program prioritas nasional. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, pada rapat pleno bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP-Otsus Papua) yang dilangsungkan di Manokwari, Papua Barat pada 5 November 2025 (Tegar, 2025). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah agenda utama yang diharapkan mampu menjawab beragam tantangan yang selama ini menghambat akselerasi pembangunan di wilayah Papua, terutama dalam hal penguatan sinergitas kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Pemerhati Ekonomi Pembangunan, Jonathan Rumbiak, dalam praktiknya selama ini sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sering kali memiliki program pembangunan sendiri-sendiri di wilayah Papua, yang menyebabkan fragmentasi kebijakan (Baderi, 2025). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menyoroti masih

\*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: [ully.pratiwi@dpr.go.id](mailto:ully.pratiwi@dpr.go.id)

lemahnya koordinasi antarinstansi sehingga masih terdapat program K/L di tingkat pusat yang berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dengan agenda pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua (Damarjati, 2025).

Pembentukan KEP-Otsus Papua selaku eksekutorial, diharapkan dapat membantu BP3OKP, khususnya dalam memperkuat sinergitas kelembagaan untuk mengoordinasikan dan menyinkronisasi agenda utama yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas terkait sinergitas kelembagaan, yaitu BP3OKP sebagai pengarah kebijakan, KEP-Otsus Papua sebagai eksekutorial, K/L terkait, pemerintah pusat, dan Pemda dalam upaya mendorong akselerasi pembangunan di wilayah Papua.

### **Sinergitas Kelembagaan dalam Program Prioritas Pembangunan Papua**

BP3OKP dan KEP-Otsus Papua merupakan dua pilar kelembagaan kunci dalam mewujudkan sinergitas kelembagaan untuk mendorong terwujudnya akselerasi pembangunan di wilayah Papua. BP3OKP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang BP3OKP, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2022.

BP3OKP atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP) dirancang untuk memperkuat arah kebijakan, sinkronisasi program, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Papua, khususnya dalam koordinasi perencanaan antar K/L dan penggunaan dana Otsus Papua. Sedangkan KEP-Otsus Papua baru dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan KEP-Otsus Papua, yang ditetapkan pada 8 Oktober 2025. KEP-Otsus Papua selaku eksekutorial dibentuk untuk memperkuat dan membantu keberlanjutan pelaksanaan tugas BP3OKP yang berfokus pada fungsi eksekutorial, sinkronisasi, koordinasi, harmonisasi, dan penguatan implementasi kebijakan Otsus Papua secara efektif.

Penguatan dan optimalisasi sinergitas antarlembaga, yaitu BP3OKP sebagai pengarah kebijakan, KEP-Otsus Papua sebagai eksekutorial, K/L terkait, pemerintah pusat, dan Pemda di wilayah Papua, dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam program-program prioritas pembangunan di wilayah Papua. Utamanya untuk menghadapi tantangan yang ada dapat diupayakan melalui: *Pertama*, berkaitan dengan terbentuknya komite baru, yaitu KEP-Otsus Papua yang berfungsi sebagai eksekutorial untuk memperkuat dan membantu keberlanjutan pelaksanaan tugas BP3OKP. BP3OKP dan KEP-Otsus Papua yang dibentuk tidak hanya mengoordinasikan program lintas K/L, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah pusat, Pemda, dan masyarakat Papua.

*Kedua*, terkait dengan adanya fragmentasi kebijakan atau tumpang tindih program di pusat dengan daerah, maka sinergi antarlembaga perlu difokuskan untuk



mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua yang mengacu pada Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), khususnya RAPPP periode tahun 2025-2029. RAPPP Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan untuk mengatasi disparitas program-program K/L di pusat hingga ke daerah dan meminimalkan potensi duplikasi program yang masih terjadi di wilayah Papua.

*Ketiga*, meningkatkan efektivitas forum koordinasi antarlembaga, termasuk K/L serta pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota melalui sistem digitalisasi. Penguatan mekanisme *monitoring*, evaluasi terpadu, serta sistem pelaporan berbasis data melalui SIPPP (Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua) perlu dioptimalkan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki basis data dan informasi yang sama. Melalui optimalisasi SIPPP diharapkan dapat mendukung perencanaan, pemantauan, dan pelaporan program secara digital dan berbasis data.

*Keempat*, memperluas ruang partisipasi keterlibatan Orang Asli Papua (OAP), tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Papua dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program prioritas untuk memperkuat kapasitas tata kelola birokrasi daerah. Pelibatan masyarakat lokal akan mendorong akurasi kebutuhan pembangunan di wilayah Papua, juga memperbaiki efektivitas penyaluran dana Otsus agar tepat sasaran, serta memperkuat legitimasi program-program prioritas di tingkat akar rumput.

### **Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Papua**

Program prioritas pembangunan Papua disusun berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Lahirnya enam provinsi di Papua, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya diharapkan berjalan seiring dengan terwujudnya akselerasi pembangunan di wilayah Papua. Sebagai langkah awal, pemerintah telah menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otsus Papua, yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah.

Saat ini, arah kebijakan pembangunan Papua telah diselaraskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Tema yang diangkat untuk pembangunan Papua adalah "Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif", dengan target kontribusi 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pertumbuhan ekonomi berkisar 6,8 persen - 7,2 persen pada periode 2025-2029 (UU Nomor 29 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2029).

Dalam praktiknya, percepatan pembangunan Papua dijalankan melalui RAPPP. Namun, untuk RAPPP periode tahun 2025-2029 saat ini masih dalam tahap finalisasi dan



harmonisasi. Kemenko Polkam menyampaikan bahwa dalam RAPPP terdapat 19 program prioritas pembangunan Papua yang mencakup pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta penekanan pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat adat. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan daerah (Humas Kemenko Polkam RI, 2025).

Pelaksanaan program prioritas pembangunan di wilayah Papua sempat menghadapi tantangan karena adanya kendala terkait keterlambatan Dana Otsus Papua. Berdasarkan penjelasan dari Kemendagri, kendala tersebut disebabkan oleh masalah administrasi di tingkat daerah yang belum memenuhi prasyarat mutlak penyaluran Dana Otsus. Seperti pertanggungjawaban rencana anggaran program (RAP), hingga dokumen pendukung lainnya (Ayyubi, 2025).

Tantangan lainnya terkait dengan fragmentasi kebijakan yang merujuk pada tumpang tindih dan kurangnya sinkronisasi antara program pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dengan Pemda. Pembangunan di wilayah Papua turut dibiayai lewat berbagai instrumen lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), serta belanja pusat langsung melalui program K/L. Adanya berbagai instrumen pendanaan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya irisan antara program pembangunan di wilayah Papua oleh pemerintah pusat dengan Pemda (Jalaludin, 2025).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan sinergitas antarlembaga, baik dari BP3OKP, KEP-Otsus Papua, K/L terkait, pemerintah pusat, dan Pemda di wilayah Papua melalui koordinasi dan sinkronisasi regulasi, integrasi pelaksanaan program prioritas yang mengacu pada RAPPP Tahun 2025-2029, pemanfaatan sistem pelaporan berbasis data melalui SIPPP, serta memperluas keterlibatan masyarakat lokal dalam rangka penguatan akuntabilitas anggaran dan tata kelola birokrasi daerah yang tepat sasaran.

## **Penutup**

Komisi II DPR RI perlu memberikan perhatian strategis terhadap penguatan sinergitas kelembagaan dalam mewujudkan akselerasi pembangunan di wilayah Papua, khususnya sinergi antara BP3OKP, KEP-Otsus Papua, K/L terkait, pemerintah pusat, dan Pemda. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu memastikan penyaluran Dana Otsus berjalan tepat waktu, menghindari fragmentasi kebijakan, serta mendorong optimalisasi SIPPP sebagai basis data terpadu. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dana Otsus agar tepat sasaran, sekaligus menyesuaikan kebutuhan alokasi dana Otsus di enam provinsi Papua agar selaras dengan agenda utama akselerasi pembangunan di wilayah Papua dalam kerangka Indonesia-sentris.



## Referensi

- Ajir, R. (2025, Oktober 9). *Sinergi Pusat dan Daerah jadi kunci percepatan pembangunan Papua*. Respublica. <https://res-publica.id/2025/10/09/sinergi-pusat-dan-daerah-jadi-kunci-percepatan-pembangunan-Papua>
- Ayyubi, S. A. (2025, Juli 3). *Kemendagri ungkap penyebab lambatnya Dana Otsus di Papua*. Bisnis. <https://Papua.bisnis.com/read/20250703/414/1890142/kemendagri-ungkap-penyebab-lambatnya-dana-otsus-di-Papua>
- Badan Pengarah Papua. (2025). *Laporan percepatan pembangunan Papua Periode Bulan Juli Tahun 2025*. <https://badanpengarahpapua.go.id/wp-content/uploads/2025/08/Laporan-Bulanan-BPP-PBD-Juli-2025.pdf>
- Baderi, F. (2025, Oktober 10). *Akselerasi kemajuan Papua melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus*. Neraca. <https://www.neraca.co.id/article/226519/akselerasi-kemajuan-Papua-melalui-komite-eksekutif-percepatan-pembangunan-otonomi-khusus>
- Damarjati, D. (2025, Oktober 13). *Mendagri perintahkan pengawasan pembangunan Papua tak hanya di atas kertas*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/13/23084931/mendagri-perintahkan-pengawasan-pembangunan-Papua-tak-hanya-di-atas-kertas>
- Humas Kemenko Polkam RI. (2025, Juli 5). *Kemenko Polkam kawal finalisasi RAPPP 2025–2029 untuk percepatan pembangunan Papua*. Polkam. <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-kawal-finalisasi-rappp-2025-2029-untuk-percepatan-pembangunan-Papua>
- Jalaludin, I. dan Dwinh. (2025, Juli 2). *Wamendagri Ribka Haluk desak kepala daerah se-Papua: Dana Otsus harus segera terealisasi ke masyarakat*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/13251831/wamendagri-ribka-haluk-desak-kepala-daerah-se-Papua-dana-otsus-harus-segera>
- Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. (2025).
- Tegar. (2025, November 6). *Pemerintah tetapkan agenda percepatan pembangunan Papua*. rri.co.id. <https://rri.co.id/daerah/1955505/pemerintah-tetapkan-agenda-percepatan-pembangunan-Papua>

